

ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN LOMBOK UTARA

Wafiq Hazizah¹

Email: a0c022165@student.unram.ac.id

¹DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Lukman Effendi²

Email: lukman.effendi@unram.ac.id

²DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

ABSTRAK

Adapun tujuan penyusunan Laporan Magang ini, adalah untuk mengetahui Analisis *Value For Money* Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara. Tujuan ini dicapai dengan melakukan kegiatan Magang selama 4 (empat) bulan lamanya dengan melakukan aktivitas yang berkaitan pada bagian akuntansi untuk dapat mengetahui secara langsung tentang cara Analisis *Value For Money* Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara tersebut. Hasil yang didapatkan mampu menjelaskan untuk menganalisis konsep *Value For Money* (VFM) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penulis menjalani magang selama empat bulan dengan fokus pada kegiatan akuntansi yang relevan. *Value For Money* dalam konteks ini merujuk pada evaluasi efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dari program-program perencanaan dan pembangunan yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sumber daya yang dialokasikan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Selama magang, penulis terlibat dalam berbagai aktivitas seperti analisis laporan keuangan, evaluasi kinerja proyek, dan pengukuran hasil yang dicapai. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh wawasan mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip *Value For Money* di BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara.

Kata Kunci: Analisis, *Value For Money*, BAPPEDA

ABSTRACT

The purpose of preparing this Internship Report is to determine the Value For Money Analysis at the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of North Lombok Regency. This objective is achieved by conducting an internship for a period of 4 (four) months, carrying out activities related to the accounting department to gain direct insight into the Value For Money Analysis at the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of North Lombok Regency. The results obtained are able to explain the analysis of the concept of Value for Money (VFM) at the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of North Lombok Regency. In order to achieve this objective, the author underwent an internship for four months with a focus on relevant accounting activities. Value for Money in this context refers to the evaluation of the efficiency, effectiveness, and economy of planning and development programs managed by the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of North Lombok Regency. This analysis aims to assess the extent to which the allocated resources can provide optimal benefits to the community. During the internship, the author was involved in various activities such as financial statement analysis, project performance evaluation, and measurement of the results achieved. Through these activities, the author gained in-depth

insight into the application of the principles of ValueFor Money at BAPPEDA North Lombok Regency.

Keywords: *Analysis, Value for Money, Bappeda*

PENDAHULUAN

Value For Money (VMF) adalah suatu konsep penilaian kinerja khususnya dalam organisasi sektor publik, yang dilakukan berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program kerja, dengan mengacu kepada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Tujuan dari pengukuran kinerja dengan menggunakan *Value For Money* adalah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan juga dapat memperbaiki kinerja dari pemerintahan yang di ukur dengan indikator ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis, pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah. Ekonomis merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi, pencapaian *output* yang maksimum dengan input tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk pencapaian *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output*/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektifitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana Efektifitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Penilaian kinerja terhadap lembaga atau orang tidak hanya berlaku pada lembaga atau orang yang berorientasi profit saja, melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau orang non komersial. Sedangkan peran bagi BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara untuk mengelola anggaran untuk pembangunan daerah untuk memastikan setiap dana yang diberikan dapat menghasilkan hasil yang optimal. Dalam hal ini, *Value For Money* (VFM) berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai apakah anggaran yang dikeluarkan benar-benar efektif, efisien, dan ekonomis. BAPPEDA dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dihabiskan untuk proyek pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau program sosial lainnya, memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat. Mengingat anggaran yang terbatas untuk daerah seperti Kabupaten Lombok Utara, penting bagi BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara untuk tidak hanya meningkatkan *output* tetapi juga meningkatkan kualitas dan efek jangka panjang dari setiap proyek. BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara akan memiliki lebih banyak kemampuan untuk memilih pilihan yang paling ekonomis sambil mempertahankan kualitas.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan suatu instansi pemerintah yang berfungsi sebagai perencanaan pembangunan melalui upaya memadukan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat atau perencanaan pembangunan partisipatif. Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat dimana masyarakat bukan saja sebagai objek tetapi sekaligus sebagai subjek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (*bottom-up approach*) dengan kebijakan pembangunan kota, kebijakan pembangunan provinsi dan kebijakan pembangunan nasional.

Tantangan utama yang dihadapi oleh BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara adalah perencanaan anggaran yang tidak selalu terintegrasi dengan kebutuhan riil masyarakat, yang seringkali mengakibatkan penyerapan anggaran yang rendah dan inefisiensi dalam pelaksanaan program. Salah satu faktor penyebabnya adalah lambatnya proses pengadaan dan kurangnya kapasitas teknis di tingkat daerah. Untuk itu, penerapan VFM dalam pengelolaan anggaran dapat membantu BAPPEDA untuk mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan serta memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien. Dengan menggunakan pendekatan ini, BAPPEDA dapat menilai apakah setiap rupiah yang dikeluarkan menghasilkan dampak yang sebanding dengan tujuan pembangunan daerah yang ingin dicapai, dan apakah proyek yang dijalankan memberikan manfaat yang maksimal dengan biaya yang minim.

Penilaian terhadap kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara lebih ditekankan pada penilaian berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat setiap tahun anggaran, penilaian kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara lebih banyak berfokus pada pencapaian *output* yang tercantum dalam rencana kerja dari pada memeriksa hasil dari program atau kegiatan. Akibatnya, untuk memastikan bahwa program pembangunan berjalan dengan efektif dan efisien, diperlukan metode penilaian kinerja yang lebih luas yang memasukkan elemen hasil dan nilai moneter.

Menurut Mardiasmo (2018) Akuntabilitas pengelolaan anggaran menilai tingkat serapan anggaran dan penggunaan anggaran serta kesesuaian pengalokasian anggaran tersebut dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai prinsip pengalokasian anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis. Salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang diatur dengan hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengawasi dan mengatur kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Evaluasi kinerja keuangan sangat krusial dalam konteks organisasi sektor publik, termasuk dalam lingkup pemerintahan daerah. Sejak diberlakukannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk mencapai kinerja keuangan yang optimal dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara sering menghadapi masalah seperti perencanaan anggaran yang tidak tepat, penyerapan anggaran yang rendah, dan inefisiensi dalam pelaksanaan program. Anggaran dapat digunakan secara tidak efektif jika perencanaan tidak terintegrasi dengan kebutuhan nyata. Selain itu, penyerapan anggaran sering dihambat oleh proses pengadaan yang lambat dan kurangnya kemampuan teknis di tingkat daerah. Karena pengelolaan yang kurang efektif dan koordinasi yang lemah antar instansi, program pembangunan juga seringkali tidak berhasil sepenuhnya. Akibatnya, evaluasi kinerja keuangan menggunakan pendekatan *Value For Money* sangat penting untuk memastikan anggaran yang dikelola BAPPEDA Kabupaten *Value For Money* (VFM) sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Dalam era penganggaran berbasis kinerja, di mana pemerintah daerah diharuskan untuk dapat menunjukkan kinerja yang optimal dalam menggunakan anggaran publik, penerapan VFM dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan BAPPEDA dalam mengelola dana pembangunan. Penerapan prinsip ini membantu BAPPEDA untuk memastikan bahwa setiap program yang dikelola memberikan hasil yang bermanfaat sesuai dengan yang diharapkan, serta mengurangi risiko kebocoran dana atau pemborosan anggaran. Dengan demikian, VFM berperan sebagai instrumen yang tidak hanya meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga memperbaiki transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Value For Money (VFM) dalam BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara juga mendukung perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan evaluasi. Pendekatan partisipatif ini penting agar program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Dengan menggunakan VFM sebagai alat evaluasi, BAPPEDA dapat mengukur sejauh mana anggaran yang digunakan untuk proyek pembangunan benar-benar menghasilkan manfaat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta memastikan bahwa program-program yang dijalankan memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, VFM tidak hanya berfokus pada pencapaian

output fisik, tetapi juga memperhitungkan kualitas dan efektivitas dari hasil yang dicapai, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan menyusun Laporan Magang dengan judul “Analisis *Value For Money* Pada Badan Perencanaans Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara”.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Analisis

Menurut Sugiyono (2019) Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Berdasarkan pendapat tersebut, analisis merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat proses memilah, mengurai, dan membedakan sesuatu untuk digolongkan menurut kriteria tertentu sehingga dapat menghubungkan bagian-bagian menjadi suatu kesatuan yang utuh, atau dengan kata lain, analisis merupakan suatu kegiatan yang dimulai dari mencari data sampai dengan membuat suatu kesimpulan dari data tersebut sehingga data yang diperoleh dapat dipahami secara mudah baik bagi diri sendiri atau bagi orang lain.

Sedangkan dalam definisi lain, Analisis adalah proses menyadari sesuatu dengan teliti dan hati-hati, atau menggunakan data dan metode statistik untuk memahami atau menjelaskan hal tersebut. Definisi ini merupakan rumusan umum tentang analisis.

“Menurut Sudjana (2016:27), Mengatakan bahwa analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan susunannya. Kamus besar bahasa Indonesia menyatakan bahwa "analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”

Adapun menurut Habibi (2020:78), Menyatakan bahwa analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah, sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Analisis merupakan bagian dari sebuah proses untuk mengkaji sebuah data, diiringi dengan ketelitian agar dapat mencapai sebuah tujuan yang diharapkan, salah satunya mendapatkan sebuah kesimpulan yang dapat dipercaya.

Value For Money

Menurut Sugiyono (2015), *Value For Money* adalah konsep pencairan dana penggunaan dan pemerintah daerah yang menetapkan prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas, artinya pemerintah daerah harus selalu memperhatikan setiap sen/rupee (uang) yang diperoleh dan dipergunakan. *Value For Money* diterapkan tiga prinsip dalam proses pengelolaan organisasi yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (*public money*) tersebut dapat menghasilkan *output* yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target yang bertujuan untuk kepentingan publik.

Menurut Mahmudi (2016), penilaian kinerja berdasarkan *Value For Money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas kegiatan, program, dan organisasi. Bagian terpenting dari pengukuran kinerja organisasi sektor publik adalah pengukuran kinerja *value for money*. Karena pemerintah adalah wakil rakyat yang bertanggung jawab atas pengeluaran negara. Penilaian kinerja menentukan seberapa akuntabel pemerintah

dalam membelanjakan dana publik, apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Indikator Kinerja dalam *Value for Money*

Menurut Mardiasmo (2018), menyatakan bahwa fungsi indikator kinerja adalah untuk memberi orang informasi untuk mempertimbangkan saat membuat keputusan. Ini tidak berarti bahwa suatu indikator akan memberi tahu Anda tentang tingkat pencapaian program. Dua komponen indikator nilai untuk uang adalah indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi) dan indikator kualitas pelayanan (efektivitas). Sebuah kegiatan operasional dianggap ekonomis jika dapat mengurangi biaya yang tidak perlu. Oleh karena itu, pengertian ekonomi dan efisiensi pada dasarnya serupa, karena keduanya membutuhkan penghapusan atau penurunan biaya (cost reduction). Peningkatan manfaat seharusnya terkait dengan peningkatan biaya. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan input yang digunakan dan *output* yang dihasilkan. Apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya, proses kegiatan operasional dianggap efisien. Indikator efisiensi menunjukkan bagaimana masukan sumber daya suatu unit organisasi (seperti staf, upah, biaya administrasi) dan keluaran yang dihasilkan berhubungan satu sama lain. Jadi, peningkatan kinerja adalah proses atau cara untuk meningkatkan kemampuan, penampilan, atau prestasi kerja seseorang. Ini dapat dicapai oleh perusahaan, organisasi, atau perusahaan dengan berbagai cara. Dalam bukunya, Mardiasmo (2018), menyatakan bahwa fungsi indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- Membantu menjelaskan tujuan organisasi
- Mengevaluasi target akhir (hasil akhir).
- Sebagai referensi untuk proses desain program penghargaan manajemen
- Mengizinkan pemaka ijasa layanan pemerintah untuk membuat keputusan
- Untuk menunjukkan kriteria kinerja
- Untuk menunjukkan keberhasilan
- Untuk membantu dalam menentukan aktivitas dengan efektivitas biaya terbaik untuk mencapai tujuan.
- Menunjukkan area, komponen, atau proses yang masih dapat dihemat biaya.

Langkah-langkah pengukuran *Value For Money* diantaranya:

Pengukuran Ekonomi

Pengukuran ekonomi merupakan pengukuran yang mempertimbangkan masukan yang digunakan. Ekonomi ini bersifat relatif. Pertanyaan yang berkaitan dengan pengukuran ekonomi adalah :

- Apakah biaya organisasi lebih besar dari anggaran ?
- Apakah biaya organisasi lebih tinggi daripada biaya organisasi lain yang sebanding ?
- Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal ?

Menurut Zeni (2020:28) Pengukuran ekonomi membutuhkan data-data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Untuk mencocokkan seberapa besar tingkat ekonomis suatu anggaran berdasarkan pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Secara matematis, ekonomi merupakan tolak ukur antara input dengan nilai rupiah untuk memperoleh input tersebut. Menurut Zeni (2020:29) Menyatakan bahwa input ialah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan untuk menghasilkan *output* tertentu. Input dapat berupa infrastruktur,

kas, dan masukan lainnya. Pengertian nilai input ialah sejumlah dana yang diperkirakan akan keluar untuk memenuhi kepentingan dari organisasi.

Tabel 1 Kristriktik Ekonomis

Rasio Ekonomis	Kriteria Ekonomis
100% - keatas	Sangat Ekonomis
90% - 100%	Ekonomis
80% - 90%	Cukup Ekonomis
60% - 80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

Pengukuran Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2018), Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara *output* dengan input. Apabila semakin besar *output* dibandingkan dengan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Secara sistematis, efisiensi ialah perbandingan antara *output* dengan input atau dengan bahasa lainnya *output* per input.

Menurut Kariyoto (2017:79), *Output* ialah hasil, tujuan atau target yang akan dicapai dari suatu kegiatan atau program. Menyatakan bahwa pengukuran *output* harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Ditujukan ke bidang kinerja yang sesungguhnya, yaitu berupa *output* yang benar - benar menunjukkan kinerja yang diharapkan.
- Tepat sasaran, dapat diartikan bahwa tidak hanya mencerminkan estimasi kasar
- Tepat waktu, objektif, dapat diartikan yaitu tidak dapat dimanipulasi

Jika dalam pengukuran *output* tidak memiliki salah satu dari karakteristik diatas, maka sistem pengendalian yang berorientasi pada *output* kemungkinan besar akan mengalami kegagalan.

Tabel 2. Kritriktik Efisiensi

Rasio Efisiensi	Kriteria Efisiensi
100% - keatas	Sangat Efisien
90% - 100%	Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Kurang Efisien
Kurang dari 60%	Tidak Efisien

Pengukuran Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2018), Efektivitas adalah ukuran dari berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dinyatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas 18 hanya menilai apakah sebuah program/kegiatan sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Karyoto (2017:79) *Outcome* adalah dampak dari suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. *Outcome* dikatakan lebih tinggi dari pada *output*, karena *output* hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan *outcome* mengukur kualitas *output* dan dampak yang dihasilkan.

Tabel 3. Kristriktik Efektivitas

Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas
100% - keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu instansi, yaitu BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara, untuk menganalisis penerapan konsep *Value for Money*.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara. Kegiatan magang berlangsung selama empat bulan, yaitu mulai dari bulan Agustus hingga Desember 2024, dengan fokus pada bagian akuntansi dan evaluasi kinerja keuangan.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

Data Primer

- Hasil observasi langsung selama kegiatan magang di BAPPEDA.
- Wawancara dengan pegawai bagian akuntansi dan staf terkait mengenai pengelolaan anggaran serta penerapan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
- Catatan harian magang yang memuat aktivitas penulis selama berada di instansi.

Data Sekunder

- Laporan Keuangan BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara tahun 2021–2022.
- Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- Dokumen pendukung lain seperti struktur organisasi, uraian jabatan, serta data pegawai.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- Observasi: Mengamati secara langsung aktivitas bagian akuntansi dan proses pengelolaan anggaran.

- b. Wawancara: Dilakukan dengan pegawai BAPPEDA untuk memperoleh informasi mengenai penerapan prinsip *Value for Money*.
- c. Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen berupa laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, dan data pegawai.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Value For Money* (VFM) yang terdiri dari tiga indikator utama:

- a. Ekonomi: Mengukur sejauh mana input diperoleh dengan biaya yang paling rendah tanpa mengurangi kualitas.
- b. Efisiensi: Mengukur perbandingan antara *output* yang dihasilkan dengan input yang digunakan.
- c. Efektivitas: Mengukur tingkat pencapaian hasil (*outcome*) dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah analisis meliputi:

1. Mengidentifikasi data anggaran dan realisasi belanja operasional serta belanja daerah.
2. Menghitung rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas berdasarkan laporan keuangan tahun 2021–2022.
3. Membandingkan hasil perhitungan dengan standar kinerja yang berlaku.
4. Menarik kesimpulan mengenai tingkat penerapan prinsip *Value For Money* di BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diimplementasikan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara, maka terjadi perubahan secara organisatoris dan struktural di seluruh lingkup Pemerintahan.

Belanja Operasional

Anggaran untuk belanja operasional pada tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp8.462.917.807,00, tetapi yang dilakukan hanya Rp8.238.612.370,00, sehingga persentase realisasinya adalah 97,35%, menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah digunakan, tetapi masih ada yang tidak digunakan. Situasi ini menunjukkan bahwa program yang direncanakan mungkin menghadapi masalah. Ini bisa terjadi karena banyak hal, seperti ketidakpastian tentang kebutuhan operasional atau keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Memasuki tahun 2022, anggaran untuk belanja operasional turun menjadi Rp8.178.116.716,00. Namun, realisasi belanja juga turun menjadi Rp7.970.857.396,00 dengan persentase realisasi sebesar 97,47%. Peningkatan sedikit ini menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan efisiensi, meskipun total belanja operasional yang terealisasi tetap tidak mencapai jumlah anggaran yang ditetapkan. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Oprasional BAPPEDA Lombok Utara Untuk Tahun
Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2022

Tahun	Belanja Oprasional		
	Anggaran	Realisasi	%
2021	8.462.917.807,00	8.238.612.370,00	97,35
2022	8.178.116.716,00	7.970.857.396,00	97,47

Sumber: LKJP BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara

Anggaran belanja operasional BAPPEDA Lombok Utara untuk tahun 2021 dan 2022 ditunjukkan dalam Tabel 4. Ini menunjukkan seberapa baik dan efisien organisasi mengelola anggaran belanja operasional. Kita dapat memahami kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan dengan melihat angka-angka yang ada. Pengelola anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara sangat khawatir tentang pencapaian target belanja operasional selama dua tahun berturut-turut. Proses perencanaan dan pelaksanaan program mungkin perlu dievaluasi karena keterbatasan anggaran. Untuk memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai rencana, analisis menyeluruh diperlukan untuk menemukan penyebab anggaran yang hilang.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan kesulitan yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara dalam mencapai target belanja operasional. Terlepas dari upaya untuk meningkatkan efisiensi, pencapaian di bawah seratus persen selama dua tahun berturut-turut menunjukkan bahwa ada yang perlu diperbaiki. Di masa mendatang, evaluasi dan penyesuaian dalam pengelolaan anggaran akan sangat penting untuk meningkatkan penggunaan anggaran dan menjamin pelaksanaan program yang lebih baik.

Belanja Daerah

Anggaran belanja daerah untuk tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp. 8.531.653.457,00, tetapi yang terjadi hanya sebesar Rp8.304.133.220,00, dengan persentase realisasi sebesar 97,33%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar anggaran telah digunakan, masih ada sisa yang tidak digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa ada masalah dengan menjalankan program yang telah direncanakan, yang mungkin disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi bagaimana anggaran digunakan.

Anggaran belanja daerah untuk tahun 2022 turun menjadi Rp8.315.683.115,00, dan realisasinya sebesar Rp8.108.398.796,00, dengan persentase realisasi sedikit meningkat menjadi 97,51%. Meskipun persentase realisasi meningkat, total belanja yang terealisasi masih di bawah anggaran yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan efisiensi, pengelolaan anggaran masih sulit.

Tabel 5 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah BAPPEDA Lombok Utara Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2022

Tahun	Belanja Daerah		
	Anggaran	Realisasi	%
2021	8.531.653.457,00	8.304.133.220,00	97,33
2022	8.315.683.115,00	8.108.398.796,00	97,51

Sumber: Lkjp BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara

Tabel 5 ini menunjukan realisasi anggaran belanja daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara untuk tahun 2021 dan 2022. Informasi ini memberikan gambaran tentang efektivitas pengelolaan anggaran di tingkat daerah.

Pengelola anggaran mengeluh karena target realisasi belanja daerah tidak tercapai dalam dua tahun berturut-turut. Ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan dan perencanaan anggaran memerlukan evaluasi lebih lanjut. Untuk memastikan bahwa setiap program dapat dilaksanakan dengan baik, sangat penting untuk mengidentifikasi komponen yang menyebabkan kekurangan anggaran. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara masih menghadapi sejumlah kendala dalam mencapai target belanja daerah. terlepas dari peningkatan

kecil dalam persentase realisasi, pencapaian di bawah 100% selama dua tahun menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran harus diperbaiki. Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dan menjamin keberhasilan program yang lebih baik, evaluasi dan penyesuaian strategi di masa mendatang akan sangat penting.

Analisis Pengukuran Kinerja Dengan *Value For Money*

Metode *Value For Money* digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara. Metode ini menggunakan rasio ekonomis, rasio efisien, dan rasio efektif untuk menghitung kinerja keuangan.

Rasio Ekonomi

Pengukuran tingkat ekonomi dalam pengelolaan keuangan dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran dengan target anggarannya dan menentukan tingkat biaya yang dikeluarkan sektor publik untuk menyediakan layanan publik.

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{realisasi anggaran belanja daerah}}{\text{target anggaran belanja daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{8.304.133.220,00}{8.531.653.457,00} \times 100\% \\ &= 97,33\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2022} &= \frac{8.108.398.796,00}{8.315.683.115,00} \times 100\% \\ &= 97,51\% \end{aligned}$$

Tabel 6 Rasio Ekonomi Kab.Lombok Utara Tahun 2021 dan 2022

Tahun	Targer Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Anggaran Belanja Daerah	%
2021	8.531.653.457,00	8.304.133.220,00	97,33
2022	8.315.683.115,00	8.108.398.796,00	97,51

Pengukuran tingkat ekonomi adalah tingkat biaya yang dikeluarkan sektor publik untuk menyediakan pelayanan publik. Ini diukur dalam pengelolaan keuangan dengan membandingkan realisasi anggggaran belanja dengan target anggaran dan presentase tingkat pencapaian. Apabila hasil lebih dari 100% maka dapat dikatakan bahwa anggaran sangat ekonomis. Apabila hasil antara 90%- 100% maka anggaran ekonomis. Jika hasil antara 80%-90% maka anggaran dikatakan cukup ekonomis, dan hasil antara 60%-80% dapat dikatakan anggaran kurang ekonomis. Apabila hasil dibawah 60% anggaran dikatakan tidak ekonomis. Berikut analisis kinerja keuangan dengan menggunakan konsep *Value For Money* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara tahun 2021 dan 2022 dari segi Ekonomi:

Tabel 7 Pengukuran Rasio Ekonomi

Tahun	RASIO Ekonomi	Kriteria
2021	97,33%	Ekonomis
2022	97,51%	Ekonomis

Sumber: Lkjp data diolah,2024

Pada tahun 2021, Rasio ekonomi pelaksanaan anggaran belanja oprasional dan belanja daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2021 adalah 97,33%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dan pendapatan dari belanja oprasional dan belanja daerah adalah ekonomis. Hal ini berarti kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara tahun 2021 menunjukan kinerja yang baik yaitu anggaran belanja di targetkan sebesar Rp.8.531.653.457,00 yang mana terdiri dari belanja operasional, belanja modal, dan belanja tidak terduga lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh belanja yang dianggarkan sebesar Rp.8.3040133.220,00 .

Pada tahun 2022, Rasio ekonomi pelaksanaan anggaran belanja oprasional dan belanja daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara adalah 97,51% yang artinya ekonomis dalam pengelolaan anggaran dan belanja oprasional. Hal ini berarti kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara tahun 2022 menunjukan kinerja yang baik yaitu anggaran belanja di targetkan menunjukkan sebesar Rp.8.315.683.115,00 yang mana terdiri dari belanja operasional, belanja modal, dan belanja tidak terduga lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh belanja yang dianggarkan sebesar Rp.8.108.398.796,00.

Pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021, Rasio Ekonomi pelaksanaan anggaran BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara tercatat sebesar 97,33%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dan belanja daerah sudah ekonomis. Anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 8.531.653.457,00, sementara yang terealisasi hanya Rp. 8.304.013.220,00, mencerminkan pengelolaan yang efisien. Pada tahun 2022, Rasio Ekonomi sedikit meningkat menjadi 97,51%, dengan anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 8.315.683.115,00 dan realisasi sebesar Rp. 8.108.398.796,00, yang juga menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Dibandingkan dengan tahun 2021, kinerja keuangan BAPPEDA pada 2022 sedikit lebih baik, dengan rasio yang lebih tinggi dan penghematan anggaran yang lebih besar, meskipun selisihnya tidak signifikan. Secara keseluruhan, kedua tahun menunjukkan pengelolaan anggaran yang ekonomis dan efisien, dengan sedikit perbaikan pada tahun 2022.

Rasio Efisiensi

Tingkat efisiensi dapat didefinisikan sebagai perbandingan input atau *output* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Pencapaian *output* yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai pengukuran tingkat efisiensi.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{realisasi anggaran belanja daerah}}{\text{realisasi anggaran belanja oprasiomnal}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{8.304.133.220,00}{8.238.612.370,00} \times 100\% \\ &= 100,80\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2022} &= \frac{8.108.398.796,00}{7.970.857.398,00} \times 100\% \\ &= 102,73\% \end{aligned}$$

Tabel 8 Rasio Efisiensi Kab. Lombok Utara Tahun 2021 dan 2022

Tahun	Rasio Belanja Daerah	Rasio Belanja Oprasional	%
2021	8.304.133.220,00	8.238.612.370.00	100,80
2022	8.108.398.796,00	7.970.857.396,00	102,73

Sumber: LKJP data diolah,2024

Pengukuran tingkat efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output* atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Apabila hasil lebih dari 100% maka dapat dikatakan bahwa anggaran sangat efisien. Apabila hasil antara 90%-100% maka anggaran efisien. Jika hasil antara 80%-90% maka anggarann cukup efisien, dan hasil antara 60%-80% dapat dikatakan anggaran kurang efisien. Apabila hasil dibawah 60% anggaran dikatakan tidak efisien. Berikut analisis kinerja keuangan dengan menggunakan konsep *Value For Money* BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara tahun 2021 dan 2022 dari segi efisiensi :

Tabel 9 Pengukuran Rasio Efisiensi

Tahun	Rasio Efisiensi	Kriteria
2021	100,80%	Sangat Efisien
2022	102.73%	Sangat Efisien

Sumber: LKJP data diolah, 2024

Pada tahun 2021, Rasio efisiensi pelaksanaan anggaran belanja oprasional dan belanja daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara adalah 100,80% yang artinya sangat efisien dalam pengelolaan anggaran belanja oprasional dan belanja daerah. Hal ini berarti Kinerja Pemerintah tahun 2021 menunjukkan kinerja yang baik, yaitu anggaran belanja daerah yang terealisasi sebesar Rp.8.304.133.220,00 yang diterima sebesar Rp.8.238.612.370,00 yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga sedangkan realisasi anggaran yang mana yang sah.

Pada tahun 2022, Rasio efisiensi pelaksanaan anggaran belanja oprasional dan belanja daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara adalah 102,73% yang artinya sangat efisien dalam pengelolaan anggaran belanja oprasional dan belanja daerah. Hal ini berarti Kinerja Pemerintah tahun 2022 menunjukkan kinerja yang baik, yaitu anggaran belanja daerah yang terealisasi sebesar Rp.8.108.398.796,00 yang diterima sebesar Rp.7.970.857.398,00 yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga sedangkan realisasi anggaran yang mana yang sah.

Pada tahun 2021 dan 2022, Pada tahun 2021, Rasio Efisiensi pelaksanaan anggaran BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara tercatat sebesar 100,80%, yang menunjukkan pengelolaan anggaran yang sangat efisien. Realisasi anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp. 8.304.133.220,00, sedangkan anggaran yang diterima sebesar Rp. 8.238.612.370,00, menunjukkan bahwa pengeluaran sedikit lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan, mencerminkan efisiensi yang baik. Sementara pada tahun 2022, Rasio Efisiensi meningkat menjadi 102,73%, yang berarti anggaran pada tahun tersebut lebih sangat efisien lagi. Pada 2022, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 8.108.398.796,00, dengan penerimaan sebesar Rp.7.970.857.398,00, menunjukkan pengelolaan anggaran yang lebih optimal dibandingkan tahun 2021. Dengan demikian, meskipun kedua tahun menunjukkan efisiensi yang sangat baik,

tahun 2022 mengalami peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan tahun 2021. Oleh karena itu, peningkatan rasio efisiensi dari 100,80% pada 2021 menjadi 102,73% pada 2022 dapat dikatakan sebagai perbaikan yang baik dalam hal pengelolaan keuangan dan penggunaan sumber daya yang lebih optimal.

Rasio Efektivitas

Apabila suatu organisasi, program, atau kegiatan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, itu dianggap efektif. Tingkat efektivitas diukur dengan mengukur seberapa besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{realisasi anggaran belanja operasional}}{\text{target anggaran belanja operasional}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{8.238.612.370,00}{8.462.917.807,00} \times 100\% \\ &= 97,35\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2022} &= \frac{7.970.857.396,00}{8.178.116.716,00} \times 100\% \\ &= 97,47\% \end{aligned}$$

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Apabila hasil lebih dari 100% maka dapat dikatakan bahwa anggaran sangat efektif. Apabila hasil antara 90%-100% maka anggaran efektif. Jika hasil antara 80%-90% maka anggaran dikatakan cukup efektif, dan hasil antara 60%-80% dapat dikatakan anggaran kurang efektif. Apabila hasil dibawah 60% anggaran dikatakan tidak efektif. Berikut analisis kinerja keuangan dengan menggunakan konsep *Value For Money* BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara tahun 2021 dan 2022 dari segi Efektivitas :

Tabel 10 Pengukuran Rasio Efektivitas

Tahun	Rasio Efektivitas	Kriteria
2021	97,35%	Efektif
2022	97,47%	Efektif

Sumber: Lkjp data diolah, 2024

Pada tahun 2021, Rasio efektivitas pelaksanaan anggaran belanja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara yaitu sebesar 97,35% yang artinya efektif dalam pengelolaan anggaran belanja operasional dan belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara telah melakukan kinerja yang baik pada tahun 2021. Anggaran operasional sebesar 8.238.612.370,00 telah direalisasi, termasuk anggaran operasional yang ditargetkan sebesar 8.462.917.807, yang merupakan anggaran operasional daerah yang sah. Pemerintah daerah dikatakan berhasil jika dapat merealisasikan anggaran belanja lebih besar dari target belanja operasional yang ditetapkan, dan biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran belanja daerah lebih kecil dari pada target anggaran belanja yang diterima.

Pada tahun 2022, Rasio efektivitas pelaksanaan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2022 adalah 97,47%, yang menunjukkan bahwa organisasi ini mengelola anggaran operasional dan anggaran daerah

dengan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara telah melakukan kinerja yang baik pada tahun 2022. Anggaran operasional yang dihasilkan sebesar 7.970.857.396,00, termasuk anggaran operasional yang ditargetkan, sebesar 8.177.116.716,00, yang merupakan anggaran operasional daerah yang sah. Pemerintah daerah dianggap berhasil jika mereka dapat menyelesaikan anggaran belanja mereka kurang dari target belanja operasional yang ditetapkan, dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan anggaran belanja daerah lebih besar dari target yang diterima.

Pada tahun 2021 dan 2022, Pada tahun 2021, Rasio Efektivitas pelaksanaan anggaran BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara tercatat sebesar 97,35%, yang menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif karena anggaran yang direalisasikan lebih kecil dari target anggaran yang ditetapkan, dengan anggaran operasional sebesar Rp. 8.238.612.370,00, sementara targetnya Rp. 8.462.917.807,00. Hal ini mencerminkan kinerja yang baik, karena anggaran yang diterima berhasil digunakan dengan efisien. Pada tahun 2022, Rasio Efektivitas sedikit meningkat menjadi 97,47%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.970.857.396,00, dibandingkan dengan target anggaran Rp. 8.177.116.716,00. Meskipun ada sedikit penurunan pada jumlah anggaran yang diterima pada tahun 2022, kinerja pengelolaan anggaran tetap menunjukkan efektivitas yang baik, bahkan sedikit lebih efektif dibandingkan tahun 2021. Secara keseluruhan, kedua tahun menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif, dengan tahun 2022 mengalami sedikit peningkatan dalam efektivitasnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Konsep *Value For Money* yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2021 dan 2022 telah menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu: Rasio ekonomi kinerja keuangan pada tahun 2021 dan 2022 di kategorikan ekonomis, karena rasio ekonomis yang mencapai 90%-100%. Ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sudah sangat efisien, dengan alokasi yang minimal namun tetap sesuai dengan tujuan dan kegiatan yang telah ditetapkan. Rasio efisiensi untuk realisasi anggaran terhadap *output* dari tahun 2021 dan 2022 di kategorikan sangat efisien di karenakan hasil rasionya berada di antara atas 100% ini menunjukkan jika pengelolaan anggaran belanja sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas kinerja keuangan pada tahun 2021 dan 2022 di kategorikan efektif karena tingkat rasionya efektivitasnya berada rata-rata di antara 90% - 100%. Ini menunjukkan bahwa program/sasaran kegiatan sudah terealisasi mencapai hasil yang maksimum. Kinerja keuangan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2021 dan 2022 sangat baik. Dengan rasio kinerja keuangan mencapai 90%-100%, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah berhasil mengelola anggaran secara ekonomis, menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan disiplin dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, yang penting untuk menjaga keberlanjutan dan efektivitas program-program pemerintah.

Disarankan agar pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara mengurangi biaya operasional. Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara berharap dapat menghasilkan *output* yang lebih besar dari tahun ke tahun sehingga kinerja ekonominya dapat ditingkatkan. Pelatihan staf Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara akan meningkatkan kemampuan perencanaan dan pengelolaan anggaran. Kinerja keuangan ditingkatkan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Memanfaatkan umpan balik masyarakat untuk menentukan sasaran program memastikan bahwa program yang dilaksanakan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga setiap kegiatan memiliki dampak yang lebih besar. Kolaborasi dengan organisasi non-

pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat meningkatkan dukungan dan sumber daya untuk program, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas implementasi.

REFERENSI

- Liando. (2014). Analisis *Value For Money* Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten Sleman Periode 2018-2021. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Mahmudi. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Pendekatan *Value For Money* Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. 7(1), 26454–26465.
- Mardiasmo. (2018a). Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global Vol Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Value Money Pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2020-2022. 1(3).
- Mardiasmo. (2018b). Analisis *Value For Money* Dalam Mengukur Kinerja Keuangan. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(4), 86–96.
- Mardiasmo. (2018c). Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang. *Yume: Journal of Management*, 6(2), 524–537.
- Putra. (2020). Fungsi dan Tujuan Analisis. *Journal GEEJ*, 7(2), 9–27. Sudjana. (2016). Pengertian Analisis. *Repository Universitas Quality*, 6.
- Sugiyono. (2015). Analisis *Value For Money* Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Pada Stasiun Kereta Api Surabaya KOTA. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Sugiyono. (2019). Landasan Teoretis Analisis. 1–23.
- Yulianto. (2022). Tinjauan Pustaka Fungsi dan Tujuan Analisis. 18.
- Zeni. (2020). Analisis *Value For Money* Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau. 79.